



MONITORING KOLABORATIF DESA

(Mendorong Akuntabilitas Sosial
dalam Layanan Kesehatan
dan Pendidikan)

Bentuk Monitoring Kolaboratif adalah salah satu instrumen akuntabilitas sosial untuk mendorong kepedulian warga terhadap pemenuhan hak-hak layanan dasar, sehingga pemberi layanan dapat merespon kebutuhan masyarakat tersebut. Alat ini dapat memperkuat kolaborasi antara warga dan pemberi layanan (pemerintah) dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan kependudukan. Program ini diujicobakan oleh The Asia Foundation bersama mitra-mitranya dan didukung oleh KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan), kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia - sejak Februari 2017 sampai April 2018 di 30 desa, 12 kabupaten, dan 5 Provinsi.

Latar Belakang

- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Desentralisasi dan UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat membuka ruang percepatan perbaikan layanan dasar dimana pemerintah daerah diberi kewenangan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dari sisi masyarakat, UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan hak-hak masyarakat desa dengan memperkenalkan mekanisme akuntabilitas baik melalui musyawarah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintahan di atasnya (kecamatan, kabupaten/kota).
- Interaksi konstruktif antara masyarakat dengan pemerintah atau penyedia layanan belum maksimal. Warga tidak mempunyai kapasitas dan pengetahuan atas hak-hak layanan dasar, sedangkan kualitas dan kinerja penyedia layanan dasar masih perlu ditingkatkan.
- Tersedianya alternatif pembiayaan melalui anggaran desa sebagai insentif bagi pemberi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pihak Terlibat

- Kementrian/Lembaga (PPN/Bappenas & Kemendes PDTT).

- Pemberi layanan di tingkat kecamatan atau desa yang bergerak dibidang kesehatan (Puskesmas, Posyandu) dan Pendidikan (PAUD, SD, SMP).
- Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kabupaten (termasuk dinas sektoral).
- Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) & kelompok-kelompok masyarakat.

Dampak Dampak yang dihasilkan selama program:

- 67 unit layanan kesehatan dan pendidikan mengimplementasikan Monitoring Kolaboratif (36 Posyandu, 13 Puskesmas, 13 SMP, 3 Disdukcapil, 2 PAUD) yang berakibat pada membaiknya akses pada layanan kesehatan, pendidikan dan kependudukan.
- Perbaikan layanan oleh pemberi layanan (Pustu dan Polindes difungsikan, Posyandu punya jadwal lebih teratur, penambahan bidan desa, penambahan obat-obatan, penambahan jumlah toilet disekolah, dll).
- Perbaikan layanan dianggarkan lewat APBDesa (alokasi layanan Posyandu Lansia, bantuan peralatan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, anggaran untuk PAUD meningkat, bantuan alat bagi kelompok disabilitas, dll).

Proses

Ada lima langkah utama dalam menerapkan Monitoring Kolaboratif:

1. **Penguatan kapasitas pada kelompok-kelompok warga** (Pengorganisasian warga tentang hak-hak layanan dasar, transparansi dan proses perencanaan penganggaran melalui diskusi-diskusi kampung, forum musyawarah desa dan lainnya).
2. **Sosialisasi dan audiensi ke pemberi layanan** (Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pemberi layanan dan aparat pemerintah bahwa monitoring kolaboratif bukan untuk menyalahkan pemberi layanan namun untuk meningkatkan kualitas layanan berdasarkan masukan warga).
3. **Pembekalan relawan untuk menjadi fasilitator** (Pembekalan difokuskan pada 2 alat yaitu: kartu penilaian dan monitoring standar. Kartu penilaian adalah alat penilaian warga berkaitan dengan kepuasan layanan yang diberikan. Sementara monitoring standar digunakan untuk memantau sejauhmana unit layanan memenuhi standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan).
4. **FGD kartu penilaian & monitoring standar:** (FGD yang melibatkan ibu hamil, perempuan dan kelompok rentan lainnya serta siswa dan wali murid untuk memberikan penilaian yang mereka rasakan atas layanan kesehatan dan pendidikan. Layanan juga dinilai apakah memenuhi standar sesuai peraturan).
5. **Pleno hasil penilaian & tindak lanjut** (Pleno melibatkan pemberi layanan seperti kepala puskesmas, kepala sekolah, aparatatur kecamatan, kepala desa, BPD, wali murid dan perwakilan warga untuk menyampaikan hasil penilaian dan merumuskan rekomendasi perbaikan kedepan secara bersama-sama).

Perkembangan Terkini

Alat ini terus diujicobakan di lokasi-lokasi lain khususnya oleh para penggerak atau kader-kader masyarakat yang sudah berdaya. Di beberapa desa, anggaran desa untuk perbaikan layanan dasar semakin besar dari

tahun sebelumnya. Kasus-kasus perbaikan layanan semakin banyak terdokumentasi antara lain pembebasan biaya melahirkan di Kabupaten Lombok Timur, penyediaan mobil sekolah/ambulans di Bireun, fasilitasi pendidikan untuk anak difabel di Kabupaten Pemalang dan Bantaeng.

Potensi Replikasi

Monitoring kolaboratif teruji sangat efektif sehingga berpotensi untuk direplikasi baik oleh pemerintah (pemberi layanan) maupun lembaga masyarakat. Alat ini juga bisa dilembagakan atau dimanfaatkan oleh

para pendamping desa baik yang formal maupun “organik” untuk mendorong perbaikan layanan dasar melalui proses perencanaan dan penganggaran desa.

Tantangan

Tantangan utama dari kegiatan ini adalah mendorong keberlanjutan kegiatan. Pelembagaan instrumen

akuntabilitas melalui kebijakan atau regulasi tidaklah cukup dan dikhawatirkan hanya menambah beban administrasi bagi pemerintah desa dan pemberi layanan terhadap pemerintahan yang lebih tinggi. Sehingga pemberdayaan warga menjadi kunci dalam mengoptimalkan kerja-kerja akuntabilitas sosial. Untuk ini perlu dibuka kesempatan dan adanya penyediaan dukungan untuk pemberdayaan warga.



District Fasilitator melalui forum Relawan Duek Pakat Gampong (RDPG) di Aceh, sedang menyampaikan perencanaan dana desa yang partisipatif, akuntabel dan transparan.